

**MEDIKOSOSIAL:
Memandu Ikhtiar Sosial di Masa
AKB**

Karim Suryadi

Metode

Survey dilakukan 15 Maret - 30 April 2020, disaat Covid-19 eskalasinya mulai meningkat di Indonesia

→ **Asumsi:** niat tidak berwisata tidak dipengaruhi faktor penurunan sector ekonomi

Data diolah dari 1068 sample penduduk Indonesia (disebar ke seluruh provinsi), dengan purposive sampling.

Fokus :

Jawa Barat (28%),
DKI Jakarta (20%),
Jawa Timur (13%).

Analisis Data : **SEM-PLS**

1. Knowledge → Uncertain knowledge

- **Subjective** Covid-19 tidak akan menularkan pada mereka yang daya tahan tubuhnya baik dan hidup bersih
- **Objective** Hingga saat ini siklus dan pola pandemic Covid-19 masih belum diketahui secara pasti

2. Social concern → Pengaruh kepedulian sosial pada behavior

- **Responsibility** Mengurangi penyebaran virus Covid-19 merupakan salah satu tanggung jawab saya sebagai warga masyarakat
- **Awareness** Saya rasa, pandemic Covid-19 akan mempengaruhi perilaku saya selanjutnya dalam kehidupan sosial

3. Perceived risk → Resiko Covid-19

- **Psychological risk** Saya khawatir pandemic Covid-19 ini akan berlangsung lama
- **Social risk** Menurut saya, walaupun saya sehat, saya tetap berpeluang menularkan Covid-19 ke orang lain
- **Physical risk** Menurut saya besar peluang orang akan meninggal karena tertular Covid-19

4. Attitude → Sikap menghindarkan diri dari tertular Covid-19

- **Cognitive** Saya pikir, hidup bersih dan terus menjaga jarak fisik adalah keharusan untuk menghindari penyebaran Covid-19
- **Affective** Saya tidak akan berpergian kecuali untuk memenuhi keperluan pokok terkait kebutuhan pangan

5. Subjective norm → Pengaruh lingkungan sosial terdekat

- **Family permission** Keluarga inti saya (Suami/istri/anak/ortu) melarang jika saya berwisata saat ini
- **Social pressure** Teman-teman dekat saya memperlakukan jika saya berwisata saat ini
- **Government rule** Ada sanksi dari pemerintah bagi mereka yang berwisata saat ini

6. Perceived behavioral control → Kontrol diri tidak berpergian

- **Controllability** Saya meyakini bahwa ikhtiar tidak berwisata saat pandemic adalah kehendak saya
- **Self efficacy** Menurut saya tidak mudah melakukan aktivitas wisata dan berpergian pada saat pandemic

7. Behavioral Intention → Niat berwisata saat pandemic

- **Desire** Jika ada kesempatan, saya ingin jalan-jalan/berwisata/ rekreasi pada masa pandemic
- **Expect** Jika ada yang mengajak dan membiayai, saya mau jalan-jalan/berwisata/ rekreasi pada pandemic
- **Plan** Saya merencanakan akan berwisata setelah pandemic Covid-19 berakhir

Gambaran Situasi

- SUBJECTIVE NORM ke PERCEIVED RISK
- SOCIAL CONCERN ke ATTITUDE
- PERCEIVED RISK ke PERCEIVED BEHAVIORAL CONTROL

Pengetahuan dan sikap warga

- Makin kuat **knowledge** ttg pola penularan yang massif dan siklus pandemic yg masih tinggi, akan meningkatkan **persepsi resiko** bahwa covid akan berlangsung lama, dia bisa tertular dan bisa meninggal, sehingga **attitude**-nya semakin disiplin menjaga kebersihan, physical distancing dan tidak berpergian. → **VICE VERSA**

Sanksi dan persepsi resiko

Ditambah lagi, dalam **subjective norm** ada pernyataan bahwa *“jika berpergian saat ini tidak ada sanksi dari pemerintah”*, artinya makin tinggi sanksinya, makin tinggi persepsi resikonya. Sehingga berlaku kebalikannya: jika ada kebijakan pelanggaran akan menurunkan perceived risk.

Mengapa Medikososial ?

- Bencana merupakan interaksi fenomena fisik dan sosial, sehingga risikonya bisa dikurangi melalui strategi mitigasi bencana seperti penguatan kapasitas masyarakat, baik secara fisik maupun sosial, serta kelembagaan yang efektif (Valeri and Leanza, 2015).
- Secara global, muncul konsensus bahwa manajemen bencana membutuhkan pergeseran aksi dari respon reaktif menuju respon pro aktif (Henstra and McBean, 2005).

Pendekatan Kolaboratif

- Peran kelembagaan dalam manajemen bencana sejauh ini didominasi pendekatan kolaboratif khususnya dalam membangun modal sosial dan ketahanan masyarakat (Mojtahedi, 2016).
- Di negara berkembang, model kolaboratif murni tidak akan berjalan tanpa adanya struktur kelembagaan dan mediasi komunitas lokal. Sayangnya, manajemen bencana sulit terwujud jika harus mengandalkan inisiatif masyarakat, sebab sejauh ini selalu berjalan berdasarkan inisiasi dan program pemerintah (Cashtells, 2011).
- Di sisi lain, kelembagaan yang dirancang pemerintah, seringkali kurang mendapatkan kepercayaan dari masyarakat, sehingga hadir sebagai formalitas semata (Sloan, 2009).

Ketahanan Sosial Menghadapi Bencana

- Kapasitas untuk menyerap tekanan atau kekuatan yang menghancurkan, melalui perlawanan dan adaptasi,
- Kapasitas untuk mengelola atau mempertahankan fungsi dan struktur dasar tertentu pada saat terjadi bencana,
- Kapasitas untuk memulihkan diri setelah kejadian bencana (Mileti, 1999).

Para Pihak

- Berkaitan dengan peran *stakeholder* dalam bencana alam, UU No 24 Tahun 2007 Tentang Pembagian Tanggung Jawab Manajemen Bencana menegaskan bahwa *stakeholder* yang berperan ialah Pemerintah Pusat, Pemerintah daerah, BNPB, Lembaga Usaha, dan Lembaga Internasional.
- Keterlibatan pemangku kepentingan dan manajemen hubungan masyarakat sangat penting karena hal ini dapat membangun kepercayaan, ketahanan dan kinerja yang baik (Sloan, 2009).

- Dalam membangun model kolaboratif yang efektif, perlu keterlibatan badan publik dan organisasi non pemerintah dalam proses pengambilan keputusan secara formal, berorientasi pada musyawarah dan mufakat serta memiliki pembagian peran untuk melaksanakan program dan kebijakan publik.

Pemerintahan Kolaboratif

- Enam ciri pemerintahan kolaboratif, yaitu 1) Forum diinisiasi oleh badan publik, 2) Peserta forum termasuk organisasi non pemerintah, 3) Peserta terlibat dalam pengambilan kebijakan bukan hanya berperan konsultasi saja, 4) Forum tersebut bersifat formal dan merupakan rapat bersama, 5) Forum tersebut bertujuan mencari mufakat atas kebijakan dan 6) Fokus dari kolaborasi adalah kebijakan publik dan pengelolaan publik (Ansell & Gash, 2008)
- Dalam membangun jaringan, *power* merupakan komponen yang mempengaruhi lembaga/ institusi, serta menentukan model perilaku masyarakat (Castells, 2011)

Dimana Peran GB ?

- Hasil kajian menunjukkan bahwa struktur kelembagaan yang tidak efisien, menyebabkan proses kolaboratif tidak dapat berjalan dengan baik.
- Untuk membangun model kolaboratif yang efektif, perlu diaktifkan peran koordinator utama sesuai peraturan perundangan, sebagai lembaga yang paling berwenang dalam menyusun rencana mitigasi.
- Setiap stakeholders harus dipetakan perannya dalam membangun model mitigasi bencana. Dalam hal ini pemerintah harus memiliki sinergi dengan BNPB, mengatasi permasalahan koordinasinya, sehingga pusat koordinasi berada pada BNPB.
- Pemerintah daerah dan BNPB sebagai representative pemerintah, akan berperan sebagai penyusun kebijakan, strategi dan program mitigasi.

- Pemerintahan yang terlalu fokus pada pembangunan infrastruktur dan mengabaikan investasi sosial, seringkali menimbulkan pemborosan pembiayaan, karena investasi yang diberikan tidak dapat dioperasikan dengan baik oleh masyarakat.
- Pengelolaan potensi lokal tidak bisa hanya mengedepankan modal fisk, namun juga harus membangun modal sosial (Ostrom, 2002).
- Modal sosial penting karena penggerak dari pembangunan adalah sistem komunitas masyarakat itu sendiri, yang akan membentuk koordinasi dan kelompok dominan yang mampu memfasilitasi organisasi mandiri lokal serta menyediakan media dan mekanisme untuk penyelesaian konflik.

- Peran pendidikan formal dan komunitas lokal sadar bencana menjadi penting dalam memediasi pemerintah dengan masyarakat.
- Kedua agency ini yang kemudian akan membantu lembaga manajemen bencana dalam mempermudah proses implementasi strategi, menyusun program dan memaksimalkan sumberdaya (pembiayaan, insentif, regulasi dan lainnya), sehingga semua stakeholder dapat berperan dengan baik.

- Power, network dan komunikasi merupakan tiga komponen yang saling terkait, dimana kekuasaan legal, financial, teknologi mampu mempengaruhi *profit, culture & power*, melalui mekanisme kontrol dan kekuasaan yang dimilikinya (Moulaert & Cabaret, 2006).
- Dalam manajemen bencana, **network dan komunikasi** merupakan komponen yang harus dibangun dengan melibatkan modal sosial agar menjadi budaya yang mengakar dan menghasilkan kekuatan dan ketahanan masyarakat terhadap bencana.
- Dalam konteks ini, GB dinanti kiprahnya dalam membangun kedua komponen tersebut.

Hatur nuhun